

## **BAB I**

### **I. PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Panggung politik internasional selalu diwarnai polemik globalisasi. Polemik ini sebenarnya sudah berlangsung sejak puluhan tahun yang lalu, baik di kalangan agamawan, politisi, akademisi, masyarakat awam, dsb. Sampai sekarang pun polemik itu masih menjadi isu global dan akan terus berlanjut.

Terkait dengan hal di atas, seringkali juga diwarnai polemik dan pertautan antara pasar dan negara sebagai panggung politik. Pasar adalah panggung politik yang munculnya sudah berabad-abad yang lalu telah menjadi panggung politik dalam mengatur ekonomi dunia, sementara negara adalah institusi yang mempunyai peran regulasi untuk mensejahterakan rakyatnya. Namun dalam era globalisasi, pasar telah menjadi kekuatan baru dalam pentas politik internasional. Sedangkan negara sudah tidak mempunyai peran tanggungjawab lagi terhadap masyarakat.

Jika ditinjau dari sejarah perkembangan ekonomi, globalisasi merupakan salah satu fase perjalanan panjang perkembangan kapitalisme liberal, yang secara teoritis sebenarnya telah dikembangkan oleh Adam Smith dua abad yang silam. Pada dinamika politik, globalisasi adalah kemenangan pasar atas pemerintah (negara). Kekuatan utama yang menjadi panggung politik dalam globalisasi

..... (Kapitalisme) Berasal dari ideologi Barat

Misalnya, pada tahun 1990-an dalam tesisnya yang sangat terkenal dan brilian, *The End of History and the Last Man*, Francis Fukuyama, dengan penuh percaya diri mengemukakan bahwa pasca perang dingin usai, kemenangan Amerika Serikat atas Uni Soviet dalam perang dingin merupakan akhir dari sebuah sejarah umat manusia dan sekaligus ideologi kiri sosialisme serta komunisme akan berakhir. Demokrasi liberal Amerika Serikat khususnya dengan sendirinya menjadi panutan bagi seluruh negara di dunia. Kapitalisme dan demokrasi liberal menjadi puncak dan akhir peradaban dunia.

Proses globalisasi ditandai dengan pesatnya perkembangan paham kapitalisme, yakni kian terbukanya dan mengglobalnya peran pasar, investasi, dan proses produksi dari perusahaan-perusahaan multinasional yang kemudian dikuatkan oleh ideologi tatanan dunia perdagangan baru di bawah satu aturan yang ditetapkan oleh organisasi perdagangan bebas secara global<sup>1</sup>.

Pengaruh kelas-kelas globalis<sup>2</sup> yang mendunia telah memicu terjadinya krisis sosial yang mempengaruhi berbagai sektor ekonomi. Berkembangnya dan penetrasi kebijakan-kebijakan globalis telah menimbulkan ketidakadilan yang signifikan antara minoritas dalam wadah globalis dan orang-orang yang tereksplotasi, dan akhirnya terjadi ketidakadilan sosial.

Ketidakadilan sosial ini merupakan akibat dua faktor struktural: semakin tingginya konsentrasi dan sentralisasi kepemilikan melalui *merger*, pembelian saham dan kuatnya integrasi negara dengan elit perusahaan globalis. Sentralisasi keputusan-keputusan politik merupakan elemen esensial yang memanfaatkan

---

<sup>1</sup> Mansur Fakhri, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Insist, Yogyakarta, 2001, hal. 128

sumber-sumber negara untuk mempertinggi keuntungan dan pertumbuhan modal yang terkonsentrasi.

Dari kacamata historis, dalam spektrum Amerika Latin sejak tahun 1930-an sampai pertengahan 1970-an, imperialisme ekonomi pasar Amerika Serikat di Amerika Latin senantiasa ditantang oleh rezim-rezim dan gerakan-gerakan nasionalis, populis dan sosio demokratik. Secara umum tantangan ini lebih bersifat reformis daripada revolusioner, di mana Mereka mempertanyakan proyek-proyek imperialis, bukannya sistem secara keseluruhan. Tahun 1960-an sampai 1970-an menjadi saksi atas munculnya rezim-rezim gerakan populis, nasional dan demokratik di seluruh benua Amerika Latin. Kemajuan sosial dan politik yang memakan waktu "setengah abad" melahirkan perundang-undangan sosial dan ekonomi penting yang melegalkan serikat pekerja, mengatur manfaat sosial dan meluaskan pendidikan negeri serta perawatan kesehatan sampai ke kalangan buruh, industri pegawai publik, kaum petani sebagai komponen masyarakat yang substansial<sup>3</sup>

Pasca-Perang Dingin, strategi menjadi gerakan elektoral memanfaatkan ruang demokratis melalui pemilu. AS mendorong pemilu prosedural guna membentuk rezim representatif yang mendukung neoliberalisme, kapitalisme-pasar-bebas (*free-market-led-capitalism*) menggantikan kapitalisme negara (*state-led-capitalism*) di bawah diktator militer. Namun melawan Konsensus Washington merupakan penggerak utama gelombang sosialisme Amerika Latin.

Perjuangan demokrasi dalam politik melawan kapitalisme baru, neoliberal oleh para gerilyawan yang ingin mengulingkan rezim otoriter.

Pasca perang dingin, masyarakat Amerika Latin penuh ketimpangan akibat berbagai program-program neoliberal yang menjadi prioritas kebijakan neoliberal, terutama kebijakan luar negeri AS. Para pimpinan politik Amerika Latin ingin menghapus kemiskinan, ketimpangan sosial, dan jerat utang luar negeri. 60 persen populasi Amerika Latin hidup miskin, 30 persen diantaranya miskin ekstrem, 40 persen pendapatan nasional diraup 10 persen terkaya, sedangkan 40 persen termiskin meraih 15 persen. Selama 1992-2001 1,2 triliun dollar AS untuk membayar utang luar negeri. Namun, jumlah utang meningkat dua kali, dari 478,700 juta dollar AS (1992) menjadi 817,200 juta dollar AS (2001)<sup>4</sup>.

Pada abad ke 21, negara-negara Amerika Latin bergerak kespektrum kiri. Ideologi sosialisme mulai menampakkan diri seiring dengan gencarnya liberalisasi perdagangan bebas, integrasi pasar dunia, dan berkembangnya sistem kapitalisme lanjut yang dimotori oleh Amerika Serikat. Terbukti para pemimpin Amerika Latin dimotori oleh para pemimpin yang beraliran kiri serta anti AS untuk melawan kebijakan-kebijakan yang pro pasar dalam konteks global. Terpilihnya Lula Da Silva (presiden Brazil), Ivan Morales (presiden Bolivia), Tabare Vazquez (Presiden Paraguay), serta Hugo Chavez (Presiden Venezuela) adalah menjadi kenyataan bentuk perlawanan rakyat Amerika Latin terhadap berbagai kebijakan neoliberalisme Amerika Serikat dan sekutunya<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup>M Fadjroel Rachman, *Amerika Latin Melawan Neoliberalisme*, Kompas, tanggal 23 Februari 2006

Seiring dengan bangkitnya ideologi kiri (melawan kebijakan rezim neoliberal) di Amerika Latin merupakan signal baru atau bahkan bukti konkrit untuk menolak berbagai macam kerjasama, perdagangan di benua Amerika, seperti FTAA (*Free Trade of Americas Area*) atau dengan lembaga donor keuangan internasional yang dikomandoi AS. Artinya Amerika Latin semakin menjaga jarak dengan AS membuat prospek FTAA semakin suram.

Hal itu, menandakan ideology kiri/sosialisme kembali memperkuat posisi negara untuk melawan arus globalisasi dan menjadi jalan alternatif ketika neoliberalisme dan implementasi kinerja globalisasi semakin mengancam perekonomian masyarakat Amerika Latin dan tidak membawa keuntungan serta keadilan bagi masyarakat, termasuk di negara Venezuela. Dengan demikian, ideologi sampai kapanpun tidak akan musnah, ketika ideologi tidak membawa manfaat bagi masyarakat di suatu negara, maka akan muncul ideologi tandingan.

Melihat keterpurukan ekonomi Venezuela di mulai ketika Carlos Andreas Perez, dilantik sebagai Presiden pada tahun 1989. Perez mewarisi keadaan ekonomi yang carut-marut akibat korupsi dan salah urus kebijakan warisan pemerintahan Luis Herera Campains. Untuk memulihkan krisis tersebut, Perez meminta nasihat dan bantuan keuangan kepada International Monetary Fund (IMF). Dan atas saran lembaga keuangan internasional tersebut, Perez kemudian mengumumkan rencana restrukturisasi ekonomi melalui jalan neoliberal.

Pada pertengahan Februari 1989, Perez meluncurkan serangkaian kebijakan yang meliputi devaluasi mata uang besar-besaran, peningkatan harga

sejumlah besar bahan kebutuhan pokok. Selain itu, pemerintahan Perez juga melaksanakan kebijakan privatisasi terhadap sebagian BUMN yang bergerak di sektort telekomunikasi, pelabuhan, minyak, baja dan penerbangan. Perez juga meluncurkan kebijakan berupa pengurangan tenaga kerja di bidang industri strategis dan mentransfer kepemilikan kepada investor asing.

Ketika menjelaskan kemunculan Hugo Chavez ke puncak tertinggi kekuasaan politik di Venezuela, Moises Naim, Mantan Menteri dan Perdagangan Venezuela dan sekaligus direktur *Foreigner Policy Magazine* Menulis:

Politik Venezuela tidak dapat dimengerti kecuali dengan dua fakta yang saling bertentangan: Negara yang pertumbuhan ekonominya lebih baik dibandingkan dengan negara manapun di dunia pada tahun 1920 dan 1980, dan tak ada negara lain di luar Afrika yang mengalami kebangkrutan ekonomi dalam 20 tahun terakhir. Sebagai tambahan, masalah lain yang perlu dipertimbangkan adalah kemakmuran yang disebabkan oleh minyak yang dimiliki negara, yang menyebabkan sejumlah penduduk berpikir bahwa kekayaan mereka akan semakin bertambah. Namun pada kenyataannya rakyat Venezuela hidup miskin. Kontradiksi ini menyebabkan timbulnya frustrasi, kebencian dan sebagai jalan keluarnya adalah mencari obat pemunahnya dalam waktu singkat (*panace*)<sup>6</sup>.

Dari paparan Naim, ada tiga situasi yang menyebabkan munculnya Chavez kepanggung politik nasional Venezuela. *Pertama*, terjadi stuasi krisis ekonomi yang menjurus pada depresi. *Kedua*, tingkat kesenjangan sosial dan ekonomi

---

yang tinggi. *Ketiga*, akumulasi dari kedua hal tersebut memicu terjadinya konflik sosial politik dalam masyarakat.

Dengan demikian, kebangkitan Venezuela ditandai dengan terpilihnya Hugo Chavez sebagai pemimpin dan aktor baru dalam melawan ekonomi pasar yang menjadi proyek utama globalisasi. Pada konteks itulah peran negara sebagai institusi pengambil kebijakan ekonomi dan politik semakin kuat dalam “pergulatan” politik dunia. Semua itu adalah untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat Venezuela serta melindungi dari ancaman bahaya globalisasi yang menjadi proyek utama negara-negara maju, khususnya Amerika Serikat.

Kondisi ekonomi politik Venezuela itulah yang memberi jalan bagi Chavez menapaki tangga kepresiden di Venezuela. Padahal di Venezuela tidak ada gerakan revolusioner seperti Argentina ataupun Brazil, juga tidak ada gerakan sosial yang terorganisir. Gerakan sosial di Venezuela relatif kecil dan terpecah-pecah menjadi kepentingan politik dan ekonomi. Namun karena minyak merupakan sumber utama pendapatan negara, maka organisasi, baik parpol atau serikat buruh berlomba-lomba untuk mengaksesnya menjadi satu kekuatan sosial dan politik untuk mendukung Chavez dalam rangka melawan berbagai kebijakan neoliberalisme perdagangan dunia.

Dengan demikian naiknya Chávez yang hingga mampu bertahan sampai sekarang (1998-2006) sebagai Presiden merupakan *signal* baru untuk melawan berbagai kebijakan ekonomi neoliberal yang telah menyengsarakan rakyat Venezuela beberapa dekade yang silam. Program-program kenegaraan Hugo

## **B. POKOK PERMASALAHAN**

Dari uraian di atas dapat diangkat pokok permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana Hugo Chavez melakukan kebijakan perlawanan terhadap kebijakan neoliberal?

## **C. KERANGKA TEORITIK**

### **1. Konsep Counter Hegemoni Gramsci**

Salah bentuk perlawanan terhadap ekonomi pasar untuk melawan rezim neoliberal dalam era globalisasi adalah menggunakan konsep Antonio Gramsci—*counter* hegemoni.

Konsep *Counter* hegemoni banyak digunakan para teoritikus “beraliran kiri” untuk melihat dan menganalisa perkembangan dunia kapitalisme. *Counter* hegemoni dapat digunakan untuk menganalisa sistem dunia kapitalisme yang tidak “bershabat”, terutama hubungan sistem dunia terhadap negara-negara berkembang. Berkembangnya teori *counter* hegemoni tidak lepas dari teori hegemoni.

Menurut Gramsci, hegemoni dideskripsikan munculnya kekuasaan kelas revolusioner—menunjukkan pencapaian hegemoni oleh kelas kapitalis. Yang sama pentingnya adalah mempertahankan hegemonik setelah kekuasaan negara diperoleh. Sebagaimana yang dikatakan Gramsci, ketika suatu kelompok sosial telah menjadi dominan dan mempertahankan dengan gigih kekuasaan yang ada dalam genggamannya, Mereka tetap harus terus memimpin. Hegemoni tidak dapat



Hal ini untuk memperatahkan dan memperkuat otoritas sosial dari kelas yang berkuasa dalam semua kelompok masyarakat sipil, dan pembuatan kompromi-kompromi yang diperlukan untuk menyesuaikan sistem aliansi yang ada dengan kondisi yang senantiasa berubah serta aktivitas kekuatan oposisi.

Menurut Gramsci, hegemoni bukanlah hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis. Hegemoni adalah suatu organisasi konsesus. Dalam beberapa paragraf dari karyanya *Prison Note Book*, Gramsci menggunakan kata *direzione* (kepemimpinan atau pengarahan) secara bergantian secara hegemonia (hegemoni) dan berlawanan dengan *dominazione*<sup>7</sup>

Lebih lanjut, hegemoni merupakan hubungan antara kelas dengan kekuatan sosial lain. Kelas hegemoni atau kelompok kelas hegemonik adalah kelas yang mendapatkan persetujuan dan kekuatan dari kekuatan dan kelas sosial lain dengan cara menciptakan dan mempertahankan sistem aliansi melalui perjuangan politik dan ideologi.

Pokok pemikiran Gramsci yang penting terkait dengan hegemoni adalah, sebagai berikut:

1. Perjuangan kelas haruslah selalu melibatkan ideologi dan gagasan; gagasan bagaimana revolusi dicapai atau dicegah.
2. Ia menekankan bahaya supremasi kaum borjuis akan dominasi ekonomi dan kepemimpinan moral dan intelektual yang harus ditumbangkan.

---

<sup>7</sup> Gramsci, Antonio. *Prison Note Book*. London: Lawrence and Wishart, 1971. 1000.

Kepemimpinan moral dan intelektual inilah yang ditegaskan oleh Gramsci sebagai intisari hegemoni, yang didefinisikan secara panjang dengan:

"Kelompok dominan di dalam masyarakat, termasuk kelas penguasa yang fundamental tapi tak eksklusif, mempertahankan dominasi mereka dengan cara menjaga 'kesadaran spontan' kelompok subordinatnya, termasuk kelas pekerja, melalui konstruksi yang dinegosiasikan dari hasil konsensus politik dan ideologi yang melibatkan baik kelompok dominan dan yang didominasi."

Asumsi di balik teks di atas ialah: Kelas dominan telah berhasil meyakinkan kelas pekerja untuk menerima kepemimpinan moral, politik, dan kebudayaan tanpa reserve. Mereka yang berkuasa mengarahkan mayoritas populasi pada suatu kesadaran yang mereka susun. Penerapan kesadaran ini tak selalu berjalan halus, kadangkala bisa mengkombinasikan antara paksaan fisik hingga indoktrinasi intelektual, moral, kebudayaan.

Oleh karena itu, hegemoni merupakan serangkaian gagasan yang digunakan sebagai alat kelompok dominan untuk menguasai kesadaran dan kepemimpinan atas kelompok-kelompok subordinat. Hegemoni dibangun atas dasar negosiasi-negosiasi kaum borjuis/kelas penguasa, dan selama ini fungsi kepemimpinan hegemonik bekerja dalam dua model: Kontrol dengan pemaksaan: termanifestasi melalui sejumlah paksaan fisik atau ancaman (selalu digunakan apabila kepemimpinan hegemonik rendah atau rentan), Kontrol dengan konsensus: kelas penguasa menyetujui masalah individu secara sukarela menyetujui dengan

Namun apabila penguasa kehilangan konsesnsusnya, misalnya tidak lagi memimpin namun hanya dominan menggunakan kekuatan dengan pemaksaan diri. Berarti bahwa massa dalam jumlah besar telah dilepaskan dari ideologi tradisonal mereka dan tidak lagi mempercayai apa yang mereka percayai. Krisis dalam arti tersebut menandakan keadaan di mana sesuatu yang lama telah berlalu namun sesuatu yang baru belum dimulai. Dalam masa inilah yang selanjutnya disebut oleh Gramsci krisis hegemoni dari negara.

Dalam negara yang mengalami krisis hegemoni akan timbul suatu benih-benih perlawanan. Terutama bagi masyarakat *Subaltren* atau *grasroot*. Untuk melawan hegemoni pemimpin terhadap masyarakatnya dengan konsep *counter* hegemoni. *Counter* hegemoni adalah upaya untuk menentang hegemoni yang menindas. Di tataran strategi yang melibatkan kematangan berorganisasi dan melakukan aktivitas politik. Kerja kontra-hegemoni akan otomatis terhenti apabila telah tercapai masyarakat yang terbebas dari segala bentuk penindasan yang dilakukan oleh negara.

Gramsci menggambarkan *counter* hegemoni sebagai sebuah perlawanan yang berangkat dari adanya krisis hegemoni kelas penguasa, yang terjadi akibat kegagalan kelas penguasa menjalankan kebijakannya, ataupun secara sengaja dicabut kekuasaannya oleh persetujuan massa akibat berkumpulnya sejumlah massa terutama kaum petani atau intelektual borjuis yang secara tiba-tiba bangkit dari kepasifan politiknya.

*Counter* hegemoni merupakan wadah bagi perjuangan rakyat untuk

*Counter* hegemoni melalui kesadaran

yang melingkupi aspek sosial, budaya, politik ekonomi serta menyentuh aspek kognitif tentang ketertindasan yang diakibatkan hegemoni bagi masyarakat. Pandangan Gramsci tentang gerakan counter-hegemoni menjadi alat analisa terhadap sebab-sebab perlawanan yang terjadi akibat penindasan sistem neoliberalisme di Venezuela.

Naiknya hugo Chavez menjadi Presiden di Venezuela memberi inspirasi dan motivasi baru dalam melawan kebijakan-kebijakan neoliberalisme. Program-program kenegaraan Venezuela di bawah kepemimpinan Hugo Chavez bentuk counter hegemoni terhadap berbagai kebijakan neoliberal yang menghemoni. Indikasi dari hal tersebut adalah pemberdayaan masyarakat miskin dan membuat strategi kekuatan politik dan ekonomi yang bertujuan untuk memberdayakan rakyat pinggiran.

## 2. Teori Rezim

Sejak pertengahan tahun 1970-an, teori rezim internasional banyak digunakan para ahli dalam menganalisa dinamika hubungan internasional. Pada tahun 1975, John Rugie mengenalkan konsep tersebut. Menurutnya Rezim internasional adalah peraturan, rencana, energi organisasi, dan komitmen finansial secara bersama yang telah dikonsepsi oleh suatu kelompok negara<sup>8</sup>.

Selanjutnya, teori rezim internasional digambarkan sebagai prinsip-prinsip, norma-norma, aturan-aturan dan prosedur dalam pengambilan keputusan

---

<sup>8</sup> James E. Dougherty and Robert L. Pfaltzgraff, Jr. *Contending Theories of International Relation*, HarperCollins, New York, 1990, P 167

untuk menganalisa isu-isu tertentu oleh aktor-aktor hubungan internasional. Rezim dapat dikategorikan menurut fungsinya sebagai suatu rangkaian yang dapat melihat dan memperluas isu—dari isu tunggal atau isu spesifik sampai pada isu-isu yang level scop-nya lebih luas.

Menurut Stephen D. Krasner, rezim internasional terdiri dari berbagai variable yang akan menjadi faktor penyebab utama untuk melakukan tindakan-tindakan pada bidang tertentu. Menurut Krasner, pada prinsipnya rezim digambarkan “kepercayaan pada fakta, yang akan berakibat pada perilaku-prilaku yang jujur oleh berbagai pihak (pengikut)”. Prosedur dalam membuat keputusan diimplementasikan secara kolektif. Dalam teori rezim ada dua variable yang juga akan menentukan keberlangsungan suatu rezim yaitu norma dan aturan. Norma adalah standart dari perilaku untuk melaksanakan hak dan kewajiban. Sedangkan aturan adalah resep yang spesifik untuk melakukan tindakan. Jadi, konsensus bersama dari berbagai pihak terhadap norma dan aturan tersebut terhadap suatu rezim akan menentukan langgeng dan pudarnya suatu rezim<sup>9</sup>.

Menurut Oran R. Young, rezim itu terdiri dari “ tindakan institusi sosial pemerintah untuk ditarik pada aktivitas-aktivitas yang khusus (kumpulan-kumpulan aktivitas atau tindakan). Menurut Oran R. Young, Rezim terdiri dari “ institusi sosial yang mengatur tindakan pada aktivitas yang khusus (kesatuan aktivitas),” dengan unsur-unsur inti rezim yang terdiri dari hak dan aturan. Pengaturan struktur memberi peluang kepada para aktor yang tertarik akan

10 | *Journal of International Law and Politics* | Volume 1, No. 1, 2018

yang menarik untuk para pengikut (masyarakat). Yang termasuk gagasan rezim internasional adalah proses membuat keputusan yang berhubungan dengan aktivitas tertentu. Jadi, konsep rezim meliputi kedua-duanya—struktur rezim dan proses unsur-unsur rezim. Perbedaan yang dibedakan atas pemeriksaan yang memusat pada pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana dan mengapa rejim didirikan; apa organisatorisnya, struktur format mereka gunakan, seperti halnya proses keputusan yang menghasilkan output kebijakan<sup>10</sup>.

Rezim formal dibentuk secara alami atau rezim informal yang dibentuk melalui persetujuan. Rezim formal adalah hasil perundang-undangan oleh organisasi internasional. Rezim seperti itu akan menguasai dan mengatur dewan serta struktur birokrasi. Sedangkan rezim informal didasarkan hanya pada suatu konsensus yang mempunyai tujuan tertentu dan hubungan minat timbal balik antar aktor yang menghasilkan keputusan khusus (untuk suatu maksud tertentu). Rezim didasarkan pada suatu konsepsi bersama dari para pengikutnya untuk menyusun strategi-strategi khusus. Singkatnya, memerlukan aturan kerjasama dan kesepakatan bersama untuk tujuan tertentu. Rezim diciptakan secara evolusioner atau tindakan sepihak oleh salah satu kelompok yang diterima berbagai kelompok. Aktor yang sudah membentuk suatu rezim akan terlibat dalam yang menurut R. Young “proses perluasan tugas” yang akan memimpin dari waktu ke waktu untuk memunculkan suatu rezim yang lebih komprehensif. Rezim diakibatkan kerjasama yang bersifat sukarerela terhadap bidang tertentu. Mereka didasarkan pada kehendak bersama. Rezim menjadi ada sebagai hasil suatu

persetujuan atau kontrak bersama diantara pengikutnya (rakyat). Jadi, kelestarian suatu rezim akan ditentukan oleh para pengikutnya. Kesetian pengikut terhadap rezim akan membentuk suatu kelestarian yang akan menentukan langgengnya suatu rezim<sup>11</sup>.

Mengacu pada teori di atas, rezim Venezuela pra hugo Cahevz adalah salah bentuk rezim internasional neoliberal yang diterima oleh masyarakat luas. Namun praktek rezim itu harus mengalami krisis legitimasi dari rakyat. Artinya rakyat tidak puas dengan rezim itu. Sebab rezim tersebut telah menciptakan krisis dan penilapan sumber-sumber kekayaan alam terhadap negara-negara investor tanpa konsesi dan sistem bagi hasil yang imbang. Ketidakpuasan dan krisis itulah menimbulkan rezim baru—rezim bolivarian dibawah kepemimpinan Hugo Cahavez.

Rezim merupakan salah bentuk kekuasaan yang dibentuk oleh para peserta (rakyat). Negeri Venezuela dibawah pemerintahan Hugo Chavez membentuk suatu rezim—yang dinamakan rezim Bolivarian—rezim yang menolak terhadap kebijakan sistem ekonomi liberal dan globalisasi. Tujuan dibentuknya rezim Bolivarian adalah untuk melawan kebijakan-kebijakan ekonomi libaralis yang dianggap merugikan masyarakat Amerika Latin, Khususnya Venezuela. Rezim bolivarian mendapat dukungan yang dominan dari rakyat. Sehingga kelestarian suatu rezim bolivarian akan ditentukan oleh para pendukung Hugo

11. D. R. ... teori ... di Venezuela di masa pemerintahan

Hugo Chavez adalah membentuk suatu rezim Bolivarian demi keberlangsungan kekuasaannya dan sekaligus melawan rezim neoliberal.

#### **D. HIPOTESA**

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa strategi Hugo Chavez dalam melawan rezim neoliberalisme adalah melalui kebijakan-kebijakan politik yang populis dan membangun ekonomi kerakyatan menuju nasionalisasi aset-aset negara.

#### **E. TUJUAN PENULISAN**

Tujuan penulisan dalam skripsi ini adalah untuk mendiskripsikan posisi negara dan pasar di Venezuela pada masa pemerintahan Hugo Chavez. Selain itu, menempatkan studi tentang pergerakan sosial terhadap ancaman neoliberalisme dalam konteks Hubungan Internasional (HI) di era globalisasi. Dalam penulisan ini negara (*para decision maker*) menjadi aktor utama dalam penentu politik Venezuela untuk mempengaruhi politik Internasional.

Secara khusus penulisan ini bertujuan untuk meneliti kekuatan-kekuatan politik Venezuela di masa pemerintahan Hugo Chavez serta mengkaji hubungan kerjasama dengan negara lain. *Kedua*, sebagai implementasi teori terkait dengan masalah yang menjadi topik utama. *Ketiga*, ketertarikan penulis untuk menelusuri kebijakan ekonomi politik negara Venezuela di masa pemerintahan Hugo Chavez



## **F. JANGKAUAN PENULISAN**

Jangkauan penulisan dalam sebuah penyusunan penulisan ilmiah seperti skripsi adalah sangat diperlukan. Hal ini untuk menghindari adanya penyimpangan pembahasan dan pembuktian terhadap hipotesa dan pokok permasalahan yang telah diajukan.

Dalam penelitian skripsi ini penulis akan membatasi pada pembahasan tentang negara versus pasar di era Globalisasi di Amerika Latin, khususnya di Venezuela pada masa pemerintahan Hugo Chavez (1998-2006).

Selain itu, penulis juga akan menganalisa situasi ekonomi dan politik masyarakat Amerika Latin yang secara tidak langsung memberi efek domino terhadap Venezuela di masa pemerintahan Hugo Chavez.

## **G. METODE PENULISAN**

Dalam mengumpoulakan data dan fakta penulis menggunakan studi tinjauan pustaka dengan penjelasan menggunakan metode kualitatif sehingga data yang diperoleh merupakan data skunder yang didapatkan dari buku pustaka makalah ilmiah, jurna, majalah, internet, surat kabar serta sumber-sumber lain yang relevan dengan pokok permasalahan .

## **H. SISTEMATIKA PENULISAN**

Disamping pemaparan yang penulis susun di atas, sebagai unsur dari penulisan yang paling penting dalam karya ilmiah, maka perlu adanya sistematika dalam penulisan. Dengan demikian penulisan skripsi ini tidak akan melewati

kaidah penulisan ilmiah yang telah dibakukan dalam beberapa penulisan karya ilmiah yang lainnya.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa bab, yang terdiri dari Lima Bab (5 BAB).

## BAB I

Pada Bab ini terdiri dari pendahuluan. Pada bagian ini akan dijabarkan latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar teoritik, hipotesa, metodologi, serta sistematika penulisan.

## BAB II

Pada bab ini penulis akan membahas tentang sejarah dan dampak globalisasi di Amerika Latin, Rezim Politik di Amerika Latin, Realitas Kehidupan Politik dan sosial di Amerika Latin serta beberapa hal yang terkait dengan persoalan-persoalan kehidupan ekonomi dan rezim politik masyarakat Amerika Latin.

Disamping itu, penulis juga membahas tentang keadaan masalah politik dan ekonomi negara Venezuela sebelum Hugo Chavez menjadi presiden. Dalam hal ini penulis juga membahas tentang ekonomi Venezuela di masa transisi— proses pergantian rezim neoliberal ke rezim Bolivarian yang akan menjadi landasan Hugo Chavez dalam membangun roda pemerintahan Venezuela. Pada

Pada Bab ini penulis membahas tentang Strategi Hugo Chavez dalam membangun kekuatan di Bidang politik serta setrategi yang dibangunnya. Pada bagian ini, penulis mengkupas tentang metode untuk menyusun program-program kebijakan di bidang politik untuk membentuk suatu kekuatan politik untuk eksistensi Hugo Chavez. Tujuan dari itu adalah untuk mempertahankan posisi Hugo Chavez dari ancaman kudeta dari pihak oligarkis.

Seperti amandemen-amandemen yang dianggap sakral sebelum Hugo Chavez menjadi orang nomor satu di Venezuela adalah salah satu tujuan membangun politik demokrasi untuk masyarakat Venezuela tanpa diskriminasi. Selain itu, pada bab ini penulis juga membahas tentang Hubungan Venezuela dengan negara lain.

#### BAB IV

Pada bab ini penulis membahas tentang program Hugo Chavez dalam bidang ekonomi. Dalam bab ini penulis memfokuskan program-program di bidang ekonomi kerakyatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat pinggiran (*Grasroot*).

Di samping itu, penulis juga membahas tentang nasionalisasi aset-aset perusahaan-perusahaan multinasional, misalnya PDVSA yang bergerak ndi bidang Migas. Perusahaan Migas yang berhasil dinasionalisasi itu dengan cara membuat konsesi baru yang akan menjadi modal ekonomi dan sosial untuk

hubungan perdagangan Venezuela dengan negara lain, terutama negara-negara di kawasan Amerika Latin.

## **BAB V**

Dada Bab V merupakan bab terakhir. Dada bab ini merupakan ringkasan ataupun